

Pemantauan Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 di Indonesia

**Pemantauan
di Tingkat
Lokal**

No.01/LF/2009

**Dampak terhadap Penghidupan Masyarakat Perkebunan
Kelapa Sawit di Riau**

Oktober 2009

Lembaran Fakta

Sejak terjadinya krisis keuangan global (KKG) 2008/09, harga CPO (Crude Palm Oil—minyak sawit mentah) merosot tajam dan dampak negatifnya telah dirasakan masyarakat sebuah desa di Riau yang hidup dari perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Pendapatan mereka turun drastis karena merosotnya harga tandan buah segar (TBS), berkurangnya shift (giliran) dan jam kerja di pabrik kelapa sawit (PKS), berkurangnya kesempatan kerja sebagai tenaga kerja lepas di kebun sawit, dan meningkatnya harga pupuk, obat-tanaman, dan sembako. Para buruh sawit paling menderita akibat krisis ini. Pada saat harga TBS mencapai titik terendah, banyak tenaga kerja lepas kehilangan pekerjaannya, pemuda terlibat pencurian kelapa sawit dan getah karet, para istri buruh sawit harus mencari pekerjaan serabutan untuk ikut mencari nafkah, dan beberapa anak sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) terpaksa putus sekolah. Meski harga TBS mulai naik lagi, peningkatannya masih terlalu rendah dan masih belum mampu memulihkan perekonomian masyarakat seperti semula.

Mengapa Dilakukan Pemantauan di Masyarakat Perkebunan Sawit di Riau?

Di Provinsi Riau, perkebunan kelapa sawit merupakan sektor andalan, selain pertambangan minyak dan gas bumi. Sekitar 35% dari total luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia terdapat di Provinsi Riau.¹ Dari 11 kabupaten/kota di Riau, Kabupaten Kamparlah yang memiliki perkebunan terluas. Terdapat empat pola perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini, yaitu Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans), Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan (PIR-Bun), perkebunan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), dan perkebunan rakyat (pola swadaya). Perkebunan kelapa sawit tersebut sangat berperan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai petani sawit, *toke* (pedagang pengumpul), *mocok-mocok*

(tenaga kerja lepas), buruh perkebunan, dan pekerja PKS. Dari keempat pola perkebunan sawit tersebut yang paling terkena dampak krisis adalah sektor perkebunan rakyat (pola swadaya). Ketika terjadi krisis, pabrik lebih mengutamakan hasil sawit perkebunan mereka sendiri dan akibatnya, hasil sawit perkebunan rakyat tidak tertampung dan harganya jatuh ke titik terendah.



Gambar 1. Aktivitas di perkebunan kelapa sawit

Berdasarkan data BPS tahun 2007, Kecamatan Tapung Hulu merupakan kecamatan dengan produksi sawit rakyat terbesar di Kabupaten Kampar, sementara perkebunan rakyat terbesar di Kecamatan Tapung Hulu terdapat di Desa Senama Nenek yang juga merupakan ibu kota Kecamatan Tapung Hulu. Oleh karenanya, desa ini dipilih sebagai daerah sampel penelitian.

Bagaimana Kondisi Wilayah dan Masyarakat Desa Senama Nenek?

Desa Senama Nenek merupakan desa tertua di Kecamatan Tapung Hulu. Desa ini dihuni oleh penduduk asli yang terdiri atas lima suku, yaitu suku Melayu, Piliang, Petapang, Domo, dan Mandiling, selain penduduk pendatang yang umumnya berasal dari suku Jawa, Batak, dan Nias. Para pendatang kebanyakan bekerja di salah satu dari delapan perusahaan perkebunan sawit milik swasta dan milik negara yang mengelilingi wilayah desa ini. Luas Desa Senama Nenek 155.912 ha dan penduduknya berjumlah 12.252 jiwa (6.050 perempuan dan 6.202 laki-laki), dengan 3.438 KK (kepala keluarga). Jarak dari desa ke ibu kota kabupaten sekitar 60 km dan ke ibu kota Provinsi Riau sekitar 135 km.

Penduduk Desa Senama Nenek umumnya berpenghidupan sebagai pekebun kelapa sawit, baik sebagai pemilik kebun maupun sebagai tenaga kerja lepas/buruh harian kebun sawit. Budidaya tanaman sawit mulai dikenal masyarakat setempat sejak sebuah perkebunan milik negara membuka perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Trans pada 1986. Pada saat itu, masyarakat masih berladang dengan berpindah-pindah, mencari hasil hutan seperti rotan dan kayu balok, mencari ikan di sungai, dan berburu. Setelah melihat keberhasilan yang diraih sebagian masyarakat desa yang mengikuti Program PIR-Trans pada tahun 90-an (Program PIR-Trans mengharuskan 20% area perkebunan diperuntukkan bagi warga setempat), masyarakat desa lainnya mulai tertarik untuk membuka kebun kelapa sawit mereka sendiri. Kepemilikan kebun kelapa sawit rakyat rata-rata berkisar antara 1–5 ha.

Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat, sekitar 5% penduduk digolongkan *kaya*, 32% *menengah*, 43% *miskin*, dan 19% "*lebih miskin*". Penggolongan ini didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri, yaitu mengacu pada tingkat pendapatan, luas lahan yang dimiliki, jenis pekerjaan, kepemilikan aset, kemampuan menyekolahkan anak, dan kemampuan berobat. Masyarakat yang *kaya* mempunyai pendapatan lebih dari Rp100.000 per hari; memiliki lahan minimal 5 ha; menjadi toke; memiliki mobil pribadi, motor, dan truk angkutan *Colt*; bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi; dan jika sakit, berobat ke Pekanbaru dan Bangkinang. Masyarakat yang *miskin* hanya mempunyai lahan kebun seluas 1–2 ha, sementara masyarakat yang "*lebih miskin*" bekerja sebagai tenaga kerja lepas kebun sawit dan tidak mempunyai lahan kebun.

Bagaimana Dampak KKG terhadap Kondisi Perekonomian Desa?

(1) Perubahan Harga Sawit, Input Produksi dan Sembako

Akibat menurunnya harga CPO dunia sejak terjadinya KKG 2008/09, harga TBS sawit lokal turun dan mencapai titik terendah pada November 2008, meski kemudian secara perlahan meningkat hingga Mei 2009 untuk harga patokan Disbun (Dinas Perkebunan) Provinsi Riau dan Juni 2009

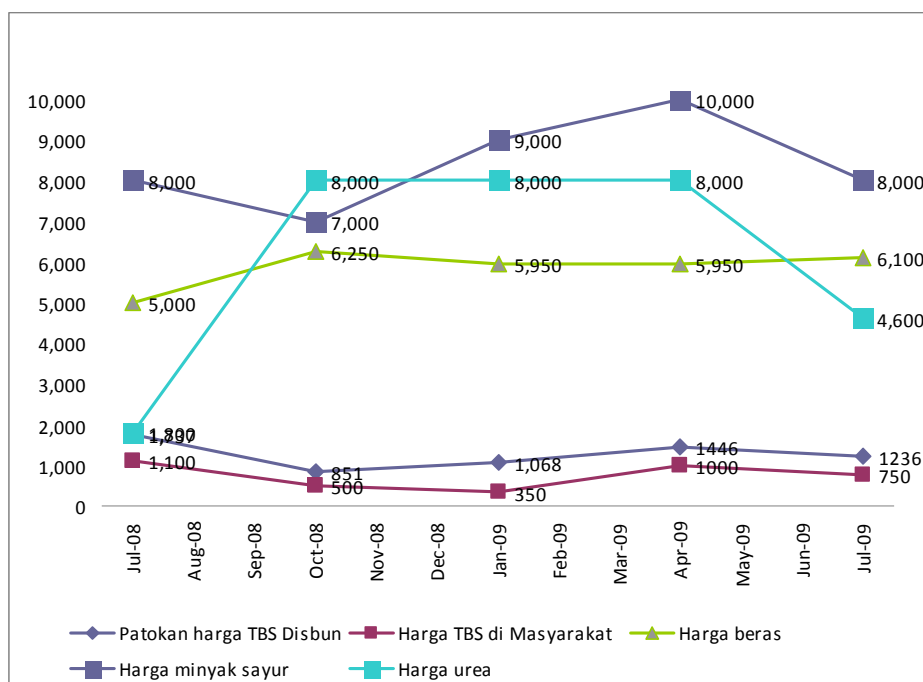
untuk harga di tingkat masyarakat. Gambar 2 menggambarkan perkembangan harga TBS sawit dalam satu tahun terakhir menurut harga patokan dari Disbun Provinsi Riau dan harga di tingkat masyarakat. Perbedaan harga di antara keduanya bisa mencapai 30% sebagai akibat kualitas TBS sawit rakyat yang rendah. Pemupukan dan perawatan yang kurang, umur tanaman yang masih muda, sering bercampurnya TBS yang telah matang dengan yang masih muda, dan banyaknya sampah pada TBS sawit merupakan beberapa alasan mengapa kualitas TBS sawit rakyat lebih rendah. Penurunan harga patokan dan harga di tingkat petani tidak terjadi secara serentak. Kenaikan harga di tingkat masyarakat terjadi sekitar satu bulan lebih lambat daripada peningkatan harga yang ditetapkan oleh Disbun Provinsi Riau.

Selain itu, harga kebutuhan pokok masyarakat dan sarana produksi pertanian justru meningkat. Misalnya, harga beras meningkat dari Rp5.000 ke Rp6.100 per kg. Harga urea meningkat dari Rp1.800 ke Rp8.000 per kg meski kemudian turun menjadi Rp4.600 per kg. Harga racun pembasmi gulma meningkat dari Rp30.000 ke Rp75.000 per liter dan kemudian turun menjadi Rp52.500 per liter.

(2) Dampak terhadap Industri Sawit

Turunnya harga TBS sawit memengaruhi kegiatan perusahaan dan kondisi ketenagakerjaan di industri pengolahan kelapa sawit. Di PKS yang dikunjungi, produksi CPO menurun, sementara CPO yang tidak dapat diekspor banyak menumpuk di Pelabuhan Dumai. Meskipun tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, *shift* dan jam kerja pabrik dikurangi dari 12 jam menjadi 10 jam per hari. Akibatnya, pekerja tidak mendapat uang lembur dan premi, dan hanya mengandalkan hidupnya pada gaji pokok mereka yang tinggal 1,4 juta rupiah per bulan. Sebelum krisis, seorang pekerja pabrik bisa memperoleh penghasilan sekitar 1,9 juta rupiah per bulan.

Sama halnya dengan di pabrik, perkebunan sawit milik negara dan swasta juga tetap mempekerjakan buruhnya, tetapi meniadakan jam kerja lembur. Akibatnya buruh juga tidak menerima uang lembur atau pun premi. Sebelum krisis,



Gambar 2. Perubahan harga beberapa komoditas dalam satu tahun terakhir (Juli 2008–Juli 2009)

seorang pekerja kebun (*pendodos*) dapat menerima penghasilan sekitar Rp2.500.000 per bulan. Setelah krisis, ia hanya menerima upah sesuai UMR yang besarnya Rp1.080.000 per bulan.

(3) Dampak terhadap Pengelolaan dan Tenaga Kerja Kebun Sawit Rakyat

Dampak KKG 2008/09 sangat terasa di kalangan perkebunan kelapa sawit rakyat, terutama ketika harga TBS jatuh ke tingkat Rp200–Rp300 per kg. Pada saat itu, kebun sawit dibiarkan terbengkalai—banyak petani tidak membersihkan atau memupuknya, dan bahkan tidak memanennya. Hal ini terjadi karena mereka merasa bahwa biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. Namun demikian, sebagian petani lainnya tetap memanen sawitnya, meski hasil panennya hanya dionggokkan di bawah pohon. Mereka beralasan bahwa kalau kelapa sawit tidak dipanen, tanamannya akan rusak. Kondisi ini secara tidak langsung menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga kerja lepas yang selama ini bekerja di perkebunan sawit rakyat. Untuk membiayai hidup, sebagian dari mereka kemudian menjadi *ninja*, yaitu pencuri kelapa sawit atau getah karet, terutama di perkebunan negara dan swasta. Diperkirakan sekitar 50% pemuda Desa Senama Nenek pernah menjadi *ninja*. Setelah kondisi membaik, jumlah *ninja* berkurang. Salah satu alasannya adalah karena ada yang tertangkap dan dipenjara.

(4) Dampak terhadap Perekonomian Masyarakat dan Daerah

Turunnya pendapatan dan daya beli masyarakat memengaruhi kegiatan perekonomian desa. Sebagai contoh, perputaran uang di sebuah pasar mingguan di Desa Senama Nenek yang dibuka setiap hari Jumat turun drastis dari 400 juta rupiah sebelum krisis ke 100 juta rupiah saat krisis mencapai puncaknya. Pada akhir Juli 2009, aktivitas pasar sudah mulai membaik dan omzetnya telah mencapai 200 juta rupiah per hari Jumat. Pasar ini tidak hanya didatangi oleh warga desa setempat, tetapi juga oleh warga desa-desa lain sekecamatan, bahkan warga desa dari luar kecamatan pun berkunjung ke pasar ini.

Beberapa dampak lain yang terlihat antara lain:

1. Banyak kredit mobil/motor dari berbagai merek macet sehingga ada yang ditarik kembali oleh perusahaan *leasing*.
2. Kredit pinjaman, baik dari UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) maupun bank, banyak yang macet. Para peminjam umumnya adalah petani yang memiliki lahan kebun sawit seluas 2 ha atau lebih.
3. Transaksi jual-beli lahan kebun sawit meningkat. Jenis lahan kebun yang paling banyak dijual adalah lahan kebun kelas menengah ke atas. Misalnya, ada seorang petani sawit pemilik kebun sawit seluas 6 ha yang telah menjual 2 ha dari lahan kebunnya yang masih sangat produktif.
4. Omzet penjualan di warung dan kepada *toke* menurun, sementara jumlah anggota masyarakat yang berutang semakin meningkat.

Permasalahan Apa yang Dirasakan Masyarakat?

(1) Kelompok Masyarakat yang Paling Terkena Dampak

Menurut hasil FGD (*focus group discussion*—diskusi kelompok terfokus) di Desa Senama Nenek, kelompok masyarakat yang paling terkena dampak krisis adalah kelompok petani sawit berskala kecil yang memiliki lahan kebun kurang dari 1 ha dan kelompok tenaga kerja lepas yang bekerja di perkebunan kelapa sawit rakyat. Keduanya masuk ke dalam kelompok miskin dan lebih miskin. Sebelum krisis, di samping mengurus lahan kebunnya sendiri, para petani sawit berskala kecil juga bekerja sampingan sebagai *mocok-mocok* pada petani sawit yang memiliki lahan luas. Dengan turunnya harga TBS, mereka terkena dua macam dampak sekaligus. Pertama, hasil penjualan kelapa sawit sangat menurun. Kedua, penghasilan sebagai tenaga kerja lepas juga menurun karena kebanyakan pemilik kebun tidak mampu mempekerjakan mereka lagi dan lebih memilih untuk mengerjakan lahan kebunnya sendiri. Hal ini juga terjadi pada mereka yang hanya bekerja sebagai tenaga kerja lepas, bahkan beban mereka terasa lebih berat. Di samping peluang kerja sebagai tenaga kerja lepas yang berkurang atau hilang sama sekali, pekerjaan lain pun sulit didapat. Mencari hasil hutan seperti dahulu pun sudah tidak mungkin karena saat ini lahan hutan sudah tidak ada lagi; lahan hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

Setelah harga TBS mulai naik lagi, kehidupan masyarakat beranjak pulih tetapi belum mencapai kondisi sebelum krisis. Tingkat harga TBS dinilai masih terlalu rendah dan merugikan petani. Dengan harga Rp800 per kg saat ini, petani sulit untuk melakukan pemupukan tanaman kelapa sawitnya. Kalau hal ini berlangsung lama, perkebunan kelapa sawit rakyat akhirnya akan rusak. Selain itu, tanpa pemupukan, hasil panen sawit akan sangat menurun. Tingkat harga TBS yang dianggap wajar adalah sekitar Rp1.200–Rp1.500 per kg. Dengan tingkat harga tersebut, selain tetap dapat memupuk tanamannya, para petani juga dapat menyekolahkan anaknya ke SMP atau SMA.

(2) Dampak terhadap Perempuan

Sebelum krisis, umumnya perempuan desa ini hanya mengurus keluarga mereka atau membantu suaminya di kebun. Setelah krisis, di antara mereka, ada yang terpaksa membantu suaminya untuk mencari nafkah, baik dengan bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau pembantu rumah tangga maupun berjualan. Namun, karena upah yang diterima juga mengecil, hingga kini tingkat kesejahteraan rumah tangga mereka pun belum pulih. Upah yang biasanya sebesar Rp50.000 per hari, sekarang kira-kira hanya sebesar Rp30.000 per hari.

(3) Dampak terhadap Anak dan Remaja

Dampak terhadap kelompok anak yang bersekolah di sekolah dasar (SD) umumnya tidak terasa karena murid-murid dibebaskan dari pembayaran uang sekolah. Selain itu, sekolah ini pun berada di lingkungan desa sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transpor. Dampak krisis hanya terasa pada berkurangnya uang jajan mereka. Uang jajan yang sebelumnya Rp2.000–Rp3.000 per hari sekarang hanya Rp1.000 per hari.

Sebaliknya, kelompok remaja, terutama mereka yang bersekolah di SMP atau SMA di luar desa seperti di Bangkinang atau Pekanbaru, sangat merasakan dampak

krisis. Ketika harga TBS berada pada titik terendah, banyak anak didik dari desa ini terpaksa berhenti bersekolah. Setelah harga kelapa sawit beranjak membaik, sebagian dari anak-anak tersebut sedianya akan disekolahkan lagi, namun karena sekolah mewajibkan mereka untuk didaftarkan kembali sebagai murid baru, sebagian orang tua murid tidak mampu membayar biayanya. Selain itu, meskipun di tingkat SMP murid telah dibebaskan dari pembayaran uang sekolah, banyak orang tua murid yang tidak mampu lagi menanggung biaya hidup anaknya selama mereka bersekolah, seperti biaya indeks, transpor, dan makan. Oleh karenanya, tingkat putus sekolah murid-murid SMP dan SMA yang bersekolah di luar desa cukup tinggi, yaitu diperkirakan mencapai 20%.

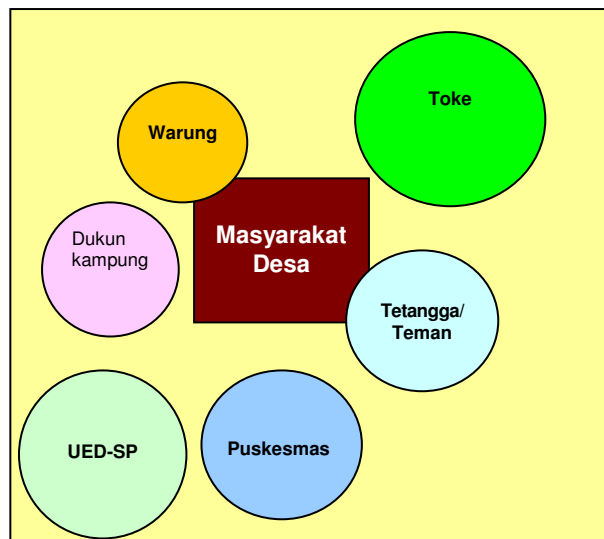
Bagaimana Strategi untuk Bertahan dan Dari Mana Sumber Bantuan yang Diterima Masyarakat?

Hingga studi ini dilaksanakan, belum ada upaya khusus pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menanggulangi dampak krisis keuangan global yang terjadi di Desa Senama Nenek. Gubernur dan Bupati setempat hanya mengimbau perusahaan-perusahaan untuk tetap membeli kelapa sawit dari masyarakat. Kelapa sawit rakyat pun akhirnya tetap diterima oleh PKS tetapi dengan harga rendah, mengikuti jatuhnya harga CPO di tingkat internasional. Harga ini bahkan bisa lebih rendah lagi karena PKS lebih memprioritaskan perkebunan milik perusahaan.

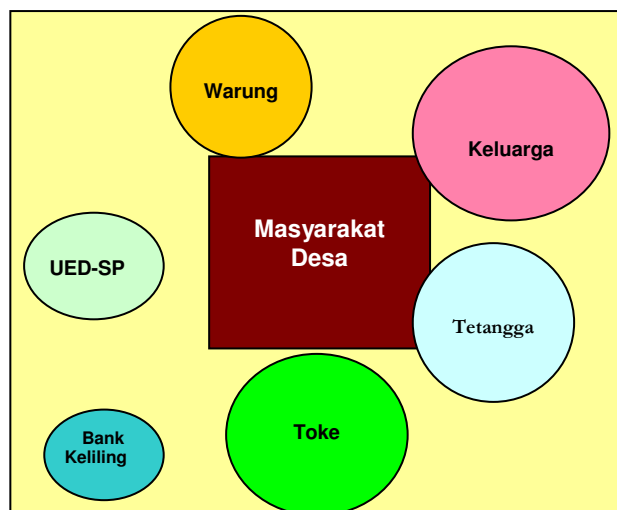
Program-program pemerintah yang telah ada selama ini seperti Raskin (Beras untuk Warga Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dinilai cukup membantu masyarakat. Raskin bisa dibeli oleh hampir semua warga desa karena alokasi beras dibagi rata, sementara sekitar 400 KK menerima BLT. Pada 2008 dan 2009, Pemkab Kampar pernah memberikan program bantuan untuk pembuatan rumah warga miskin, masing-masing sebanyak tiga unit rumah per tahun.

Sejak 2006, Gubernur Riau telah memberi dana bantuan sebesar 500 juta rupiah untuk program dana bergulir yang disalurkan melalui UED-SP kepada masyarakat Desa Senama Nenek. Dana tersebut sekarang telah berkembang menjadi 1,6 miliar rupiah. Besar pinjaman bisa mencapai 20 juta rupiah yang sebagian besar digunakan untuk biaya pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Untuk meminjam, para petani harus menyerahkan jaminan berupa SKT (surat keterangan tanah) untuk UED dan BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) untuk SP. Pinjaman di bawah 2 juta rupiah yang biasanya digunakan untuk usaha warung tidak memerlukan agunan. Namun, kredit ini tidak dapat dinikmati oleh rakyat miskin yang tidak memiliki usaha. Dalam menghadapi krisis, UED-SP memberi keringanan kepada debiturnya dengan memperbolehkan penundaan pembayaran kredit selama puncak krisis. Akumulasi penundaan pembayaran akan dilakukan pada saat jatuh tempo.

Bantuan LSM dan bantuan perusahaan dalam bentuk CSR (*corporate social responsibility*-tanggung jawab sosial perusahaan) di Desa Senama Nenek juga tidak ada. Bantuan dari perusahaan hanya bersifat insidental atau sumbangan sukarela, seperti pada perayaan 17 Agustus atau Lebaran. Namun, menurut masyarakat, bantuan ini menyebabkan terjadi pemotongan harga TBS kelapa sawit di tingkat masyarakat.



Gambar 3. Diagram Venn kelembagaan kelompok ibu



Gambar 4. Diagram Venn kelembagaan kelompok bapak

Hasil diskusi dengan kelompok ibu dan kelompok bapak menunjukkan gambaran masih besarnya peranan berbagai lembaga informal dalam menghadapi krisis. Menurut kelompok ibu, lembaga informal yang dinilai berperan besar adalah *toke*, warung, dan UED-SD; sementara yang paling dekat adalah warung dan tetangga/teman. Menurut kelompok bapak, lembaga yang paling berperan adalah keluarga, diikuti dengan toko dan tetangga, sementara menurut faktor kedekatannya, keluarga, warung, dan tetangga dinilai yang paling dekat. ■

Lembaran fakta ini disusun oleh Bambang Sulaksono, Herry Widjanarko, Arifudin, dan Kausar berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Bambang Sulaksono, Herry Widjanarko, Arifudin, dan Kausar pada pertengahan Juli 2009. Penelitian lapangan ini merupakan kunjungan pertama dari tiga kali kunjungan yang rencananya akan dilakukan setiap empat bulan sekali dalam rangka kajian Pemantauan Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 di Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU. Editor: Budhi Adrianto.

Kunjungi situs web kami di:



<http://www.smeru.or.id>

Penjelasan staf Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 24 Juli 2009.